

KRISIS DAN KOMUNIKASI PADA MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN

Agus Ganjar Runtiko

Universitas Jenderal Soedirman. Jl. Prof. H.R. Boenyamin 993 Purwokerto 53122. (0281-635292 pes. 221-222).
085227788222.

Email: ganjarruntiko@gmail.com

Tri Nugroho Adi

Universitas Jenderal Soedirman. Jl. Prof. H.R. Boenyamin 993 Purwokerto 53122. (0281-635292 pes. 221-222).
08121592049.

Email: sinaukomunikasi@gmail.com

Wiwik Novianti

Universitas Jenderal Soedirman. Jl. Prof. H.R. Boenyamin 993 Purwokerto 53122. (0281-635292 pes. 221-222).
081364307721

Email: wiwiknovianti27@gmail.com

Naskah diterima tanggal 2 April 2015, direvisi tanggal 15 Mei 2015, disetujui tanggal 22 Juni 2015

CRISIS AND COMMUNICATION AMONG RURAL POOR PEOPLE

Abstract

The effect of the crisis is often multiple on people in rural poverty that secluded and away from the reach of government. Main factor cannot be ignored in crisis is communication. Prolonged crisis will occur when the channels of communication in society clogged. This study establishes three specific targets: (1) To obtain a comprehensive overview of the rural poor people's knowledge about the crisis and the potential impact, (2) To discover crisis problems faced by the rural people poor, (3) To enlist communication problems in a crisis situation. This study used a qualitative method with a case study approach. Research data collect by conducting FGD of 40 informants selected based on purposive sampling, furthermore eight people were interviewed in depth, plus other supporting informant. The results of the research show people on those two locations have understood the crisis based on their experience of dealing with it. They believe the economic crisis as the first aspect that must be resolved. The completion of crisis should consider indigenous wisdom to avoid a new crisis.

Keywords: *crisis, communication, people in rural poverty, indigenous wisdom.*

Abstrak

Efek krisis seringkali berlipat ganda pada wilayah miskin perdesaan yang rata-rata terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah. Kesulitan koordinasi, serta kendala transportasi menjadi alasan utamanya. Faktor lain yang tidak boleh diabaikan ketika krisis adalah komunikasi. Krisis akan terjadi berkepanjangan apabila saluran-saluran komunikasi dalam masyarakat tersumbat. Komunikasi vertikal antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan, maupun komunikasi horisontal antarsesama warga masyarakat merupakan dua hal utama yang harus dibangun ketika terjadi krisis. Penelitian ini menetapkan 3 (tiga) target khusus, yaitu: (1) Mendapatkan gambaran komprehensif pengetahuan masyarakat miskin perdesaan tentang krisis

dan potensi dampaknya, (2) Menemukan permasalahan krisis yang dihadapi oleh masyarakat miskin perdesaan, (3) Menginventarisasi permasalahan komunikasi ketika dalam situasi krisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan FGD terhadap 40 orang informan yang dipilih secara purposif, selanjutnya dipilih lagi 8 orang yang diwawancarai secara mendalam, ditambah informan pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di dua lokasi tersebut telah memahami krisis yang dihadapinya. Pemahaman ini didasari pada pengalaman mereka berhadapan dengan krisis tersebut. Masyarakat berpendapat krisis ekonomi sebagai hal pertama yang harus diselesaikan. Penyelesaian krisis seharusnya berbasis kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga tidak menimbulkan krisis baru.

Kata kunci: krisis, komunikasi, masyarakat miskin, perdesaan, kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Keadaan krisis hampir dapat dipastikan selalu terjadi pada suatu organisasi. Hal ini sejalan dengan siklus organisasi yang biasanya mengalir mengikuti alur: kelahiran – perkembangan – eksistensi – dan penurunan. Biasanya krisis terjadi pada suatu organisasi ketika mendekati masa penurunan. Namun, tidak jarang pula krisis terjadi ketika sebuah organisasi sampai pada tahap eksistensi, bahkan ketika tahap perkembangan.

Masyarakat sebagai salah satu bentuk organisasi mengalami siklus dan situasi yang sama, di mana krisis dapat setiap saat terjadi. Potensi krisis akan tampak ketika ada *trend* negatif seperti yang terjadi pada tahun 2013 ini, yakni ketika tiba-tiba harga kebutuhan sehari-hari seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih naik beberapa kali lipat. Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik, serta harga bahan bakar minyak bersubsidi dapat memicu krisis susulan di masyarakat.

Jawa Tengah, meskipun tercatat sebagai salah satu lumbung beras Indonesia, tidak terlepas dari potensi krisis. Beberapa kabupaten di Jawa Tengah tercatat memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang artinya berpotensi besar terlanda krisis apabila ada guncangan nasional. Hal ini tampak dari angka statistik yang mengatakan bahwa hampir 20 persen penduduk Jawa Tengah terkategori sebagai penduduk yang sangat rawan pangan.

Tampak dari tabel 1, jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai sangat rawan pangan mengalami fluktuasi dari tahun ke

tahun. Penduduk dengan kategori sangat rawan pangan di Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 terdapat 4.307.207 penduduk yang berada pada situasi sangat rawan pangan (13.42 %). Jumlah tersebut meningkat drastis pada tahun 2013 menjadi 6.209.515 jiwa atau berkisar pada angka 19.15 persen.

Kabupaten Purbalingga dan Kebumen yang merupakan lokasi penelitian ini diselenggarakan, merupakan dua di antara beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki penduduk dalam tingkat kerawanan pangan tinggi. Ini tampak dari data statistik yang menunjukkan bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang berada di atas rata-rata.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kemiskinan sudah berada pada kondisi yang memprihatinkan. Satu dari empat penduduk di dua kabupaten tersebut merupakan penduduk yang dikategorikan miskin. Alhasil, setiap ada krisis, mereka akan menjadi pihak yang terdampak dengan efek yang berkepanjangan.

Pada keadaan kenegaraan yang tidak terprediksikan seperti saat ini, peluang terjadinya krisis sangat besar. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, letak geografis yang susah dijangkau, dan beberapa faktor penghambat lainnya, membuat masyarakat miskin yang tinggal di perdesaan berpotensi terdampak krisis yang lebih parah. Mereka berpeluang kecil tersentuh secara cepat dan tepat dalam penanggulangan krisis. Dalam kondisi demikian, diharapkan masyarakat dapat memberdayakan diri dalam menghadapi krisis yang datang sewaktu-waktu. Setidaknya, mereka mampu melakukan

tindakan darurat awal ketika krisis itu terjadi. Hal ini membutuhkan landasan kemampuan komunikasi krisis yang siap pakai. Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada upaya perwujudan kondisi masyarakat yang siap dan tanggap krisis, serta memunyai ketahanan ketika krisis terjadi. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan gambaran komprehensif mengenai pengetahuan masyarakat miskin perdesaan tentang krisis dan potensi dampaknya;
2. Menginventarisasi permasalahan krisis yang dihadapi oleh masyarakat miskin perdesaan;
3. Menginventarisasi permasalahan komunikasi ketika dalam situasi krisis;

Pengembangan model komunikasi krisis merupakan agenda mendesak yang harus segera dilakukan mengingat kondisi sosial kemasyarakatan, kenegaraan, hukum, dan ekonomi yang saat ini sedang tidak menentu. Perhatian tentang krisis sudah banyak dilakukan dalam berbagai kajian keilmuan, mulai dari kajian-kajian ilmu-ilmu eksakta hingga ilmu sosial. Pada kajian ilmu sosial dijumpai sub-disiplin ilmu manajemen krisis, kemudian ada pula komunikasi krisis yang bisa dilihat dari literatur penelitian *public relations*. Secara praktis, penanganan krisis juga telah banyak dilakukan pada berbagai tingkatan dan lapisan masyarakat,

mulai dari tingkat masyarakat rumah tangga hingga perusahaan-perusahaan multinasional. Namun ada permasalahan akut krisis yang seringkali tidak tersentuh, baik dalam kajian keilmuan, maupun dalam tindakan penanganan. Permasalahan tersebut adalah terlupakannya peranan masyarakat untuk ikut serta menangani krisis.

Pada kajian-kajian keilmuan tentang krisis, kebanyakan menyetengahkan kasus mengenai krisis yang dialami oleh sebuah perusahaan. Biasanya, pemahaman dari kajian ini berguna untuk mengetahui tanggapan organisasi terhadap krisis sudah bagus atau belum. Hal ini berguna bagi para pemimpin, atau pengambil keputusan dalam mengambil keputusan mengenai cara pengendalian krisis pada masa sebelum, ketika, ataupun setelah terjadinya krisis. Namun, kajian yang memiliki pemahaman seperti ini memunyai keterbatasan. Pertama, penanganan krisis seakan-akan menjadi beban bagi lembaga tertentu, baik perusahaan ataupun pemerintah. Kedua, krisis tersebut dengan demikian adalah krisis milik lembaga tertentu pula.

Pada tataran praktis, tidak dapat dipungkiri peran pemerintah dalam penanganan krisis seringkali tidak optimal. Di samping jumlah aparat yang terkadang tidak mencukupi, kendala geografis, jarak, bahkan komunikasi menjadi penghalang tertanganinya krisis secara cepat dan tepat.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan Jawa Tengah

2007		2008		2009		2010		2011	
Juml.	%								
4.307.207	13.42	3.683.543	11.44	4.919.828	15.22	5.557.273	17.14	6.209.515	19.15

Sumber: Buku Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2011, Badan Ketahanan Pangan.

Tabel 2
Persebaran wilayah miskin tertinggi di Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Kab. Purbalingga	221.9	205.0	208.9	27.12	24.97	24.58
Kab. Kebumen	334.9	309.6	263.0	27.87	25.73	22.71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2011.

LANDASAN KONSEP

Komunikasi Krisis

Manusia berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan aktualisasi diri. Wilmot dan Hocker (1998) mengategorisasikan kebutuhan menjadi empat hal umum: 1) *content*, 2) *relational*, 3) *identity*, dan 4) *process*. Kategori kebutuhan *content* meliputi hal mendasar dalam kehidupan manusia seperti makanan, uang, atau transportasi. Kebutuhan *relational* berkaitan dengan cara berinteraksi manusia; di mana ketika seseorang merasa dihormati atau dilindungi orang lain, maka kebutuhan ini akan berkurang. Kebutuhan *identity* merupakan kategori berikutnya dengan prasyarat adanya perasaan keamanan, dan pengakuan dari masyarakat. Terakhir, kebutuhan proses berkaitan dengan struktur atau forum dialog - proses mediasi versus peradilan, atau proses formal versus informal. Selanjutnya, tidak tercukupinya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mengakibatkan munculnya potensi krisis.

Konsep tentang krisis sebenarnya dikenal luas dalam setiap disiplin ilmu, dari eksakta hingga sosial. Namun konsep ini kemudian menjadi lebih dikenal pada kajian-kajian *public relations* atau manajemen organisasi. Secara umum Coombs (2010) mengatakan bahwa tidak ada definisi krisis yang diterima bersama. Definisi-definisi yang muncul kebanyakan berasal dari disiplin ilmu seperti *public relations*, manajemen, dan komunikasi organisasi. Literatur seringkali mengarahkan definisi krisis sebagai tahapan sebuah organisasi. Misalnya saja Devlin dalam Kriyantono (2013), yang mendefinisikan krisis sebagai "*an unstable time for an organization, with distinct possibility for an undesirable outcome*", yang dapat diartikan sebagai situasi yang tidak stabil dengan berbagai kemungkinan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Definisi ini masih ditambahkan pula dengan definisi Harrison dalam Kriyantono (2013) bahwa krisis merupakan "*critical period following an event that might negatively*

affect an organization in which decisions have to be made that will affect the bottom line of an organization. It is a time of exploration requiring rapid processing of information and decisive action to attempt to minimize harm to the organization and to make the most of a potentially damaging situation".

Selanjutnya, Coombs (2010) mendefinisikan komunikasi krisis sebagai "*the collection, processing, and dissemination of information required to address a crisis situation*." Dalam keadaan pra krisis, tindakan komunikasi krisis berkisar pada pengumpulan informasi tentang risiko krisis, membuat keputusan tentang bagaimana mengelola potensi krisis, dan pelatihan orang-orang yang akan terlibat dalam manajemen krisis. Pelatihan akan meliputi anggota tim yang menangani krisis, juru bicara krisis, dan setiap individu yang akan membantu dengan tindakan respons. Komunikasi krisis meliputi juga pengumpulan dan pengolahan informasi untuk tim krisis guna pengambilan keputusan bersama dengan penciptaan dan penyebaran pesan krisis untuk orang di luar tim. Pada keadaan paska krisis, komunikasi krisis melibatkan upaya manajemen krisis, perubahan komunikasi yang diperlukan individu, dan memberikan pesan krisis tindak lanjut yang diperlukan.

Linke dalam Putra (1999) mengategorikan krisis dengan melihat proses atau waktu kejadian sebuah krisis. Menurut kategorisasi ini krisis dibagi menjadi empat:

1. *The exploding crisis*, yakni krisis yang terjadi karena sesuatu yang di luar kebiasaan, misalnya kebakaran, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Sifat krisis ini biasanya dapat dengan mudah dikenali dan memiliki dampak langsung;
2. *The immediate crisis*, yakni sebuah kejadian yang membuat terkejut, namun masih ada waktu untuk mempersiapkan respon terhadap krisis tersebut;
3. *The building crisis*, yakni sebuah krisis yang sedang berproses dan dapat diantisipasi. Misalnya negosiasi pengelolaan lahan kas desa;

4. *The continuing crisis*, yakni problem kronis yang memerlukan waktu panjang untuk muncul. Ini biasanya sangat kompleks, kemunculannya tidak mudah, bahkan mungkin tidak dikenali.

Hale, et.al (2005) mengatakan bahwa respons merupakan tahapan paling penting di antara tiga tahapan (pencegahan, respons, dan pemulihan) dalam siklus penanganan krisis. Respons yang tepat ketika terjadi krisis mungkin akan dapat menyelamatkan banyak jiwa dan mengurangi efek krisis yang berkepanjangan. Respons krisis ini dibagi menjadi beberapa tahap: observasi, interpretasi, pilihan, dan diseminasi.

Karakteristik komunikasi krisis berbeda dalam setiap jenis organisasi. Falkheimer dan Heide (2010) membedakan karakteristik tersebut menjadi dua, yakni karakteristik komunikasi krisis tradisional dan komunikasi krisis modern, seperti tampak pada tabel 3.

Tampak dari tabel 3, perbedaan yang mencolok antara paradigma komunikasi krisis tradisional dan komunikasi krisis modern. Hal ini tentu saja berkaitan dengan karakteristik organisasi di mana krisis terjadi.

Pandangan bahwa penanganan krisis hanya merupakan konsumsi manajemen

perusahaan (*stakeholder*) atau pemerintah sangat berisiko. Keberadaan pemerintah dan *stakeholder* ini biasanya cenderung berjarak dengan masyarakat. Sehingga wajar apabila ditelusuri dalam literatur mengenai sosiologi bencana, akan ada sangat banyak bukti yang menyatakan bahwa pertolongan pertama terhadap krisis seringkali diberikan oleh masyarakat setempat. Ini berarti masyarakat merupakan pelaku utama pengendalian krisis yang hilang dari pandangan. Hilang pula peluang untuk memahami dan memperkuat peran masyarakat. Kedua, melihat krisis dari kacamata organisasi juga mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat juga sebagai penerima dampak yang besar (kadang yang terbesar) dari krisis itu sendiri.

Penanggulangan krisis ala pandangan organisasi tampaknya juga telah dipahami secara sama oleh badan dunia. Kesan yang muncul adalah fokus krisis pada organisasi pemerintah, bukan dari masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Barbara Reynold, salah satu pakar komunikasi yang terlibat dalam *training* tersebut, bahwa tanggung jawab terhadap krisis tersebut berada di tangan pemerintah dan organisasi terkait yang berkepentingan (Acandra, 2010). Untuk

Tabel 3
Karakteristik Komunikasi Krisis Tradisional dan Modern

	<i>Traditional crisis communication (then)</i>	<i>Late modern crisis communication (now)</i>
<i>Form of organization</i>	<i>Centralized (tight systems)</i>	<i>Decentralized (loose systems)</i>
<i>Process focus</i>	<i>Operational, acute, technical</i>	<i>Pre-crisis and operational-strategic</i>
<i>Leadership and control</i>	<i>Rational planning through rules and instructions</i>	<i>Improvisation within a trained strategic framework</i>
<i>Communication focus</i>	<i>The sender in the center: "spray and pray"</i>	<i>The public in the center: "relate and communicate"</i>
<i>Communicator</i>	<i>A central spokesperson</i>	<i>Network of communicators</i>
<i>Choice of media</i>	<i>Mass media</i>	<i>Mass media but also minority and micro-media and, above all, focus on interpersonal meetings</i>
<i>Communication goals</i>	<i>Recipient informed, can repeat</i>	<i>The public (communities) understand, can act on their own accord</i>

Sumber: Falkheimer dan Heide (2010).

meningkatkan *trust* organisasi, Mishra dalam Shockley-Zalabak (2006) menjelaskan peranan lima dimensi kegiatan, yakni *competence, openness and honesty, concern for employes, reliability, dan identification*. Dari kelima dimensi kegiatan tersebut, tampak peranan *Public Relations*. Apabila diurai dalam kerangka krisis di masyarakat dapat dilihat beberapa hal.

Kompetensi adalah kemampuan organisasi dalam mengondisikan relasi yang efektif di antara sesama karyawan, dan antara karyawan dengan pimpinan serta mampu bersaing dan bertahan di tingkat pasar. Keterbukaan dan kejujuran merupakan salah satu komponen transparansi yang juga mampu memberikan kontribusi terhadap tingkat kepercayaan publik kepada organisasi. Dimensi yang ditonjolkan tidak hanya jumlah dan keakuratan, tetapi juga ketulusan (*sincerely*) dan ketepatan (*appropriately*) informasi yang dikomunikasikan kepada publik lewat media. Transparansi, meski bukan solusi yang sederhana, merupakan barometer untuk mengukur tingkat keterbukaan organisasi dalam melakukan *sharing* informasi dengan *stakeholder* untuk membuat sebuah keputusan. Ini berarti bahwa setiap organisasi harus mampu bertanggungjawab dan transparan dalam menyampaikan informasi secara resmi.

Reliabilitas lebih ditentukan oleh kekonsistenan dan ketergantungan di antara manajemen, rekan kerja, tim, *supplier*, dan organisasi dalam bertindak. Dengan kata lain komunikasi yang dibangun harus bersifat simetris. Artinya apa yang dikatakan harus *kongruen* dengan tindakan yang dilakukan.

Masyarakat Miskin Perdesaan

Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi, serta kesejahteraan hidupnya rendah. Secara ringkas Sen (1999) mengatakan kemiskinan sebagai “perampasan kemampuan” (*capability deprivation*).

Menurutnya, jangkauan pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang lebih inklusif dapat menjadi kesempatan bagi mereka yang berada pada kondisi hampir miskin untuk tidak terjebak lebih jauh dalam kemelaratan.

Secara umum kemiskinan dapat digolongkan menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural (Anwas, 2013). Kemiskinan absolut merupakan tingkatan yang paling parah, di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya; seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kemiskinan relatif merupakan kondisi di mana seseorang telah dapat mendapatkan penghasilan, berada di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah rata-rata penghasilan orang-orang di sekitarnya. Kemiskinan struktural merupakan kondisi miskin yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Adapun kemiskinan kultural berkaitan dengan faktor sikap individu atau budaya masyarakat yang mengakibatkan mereka berada dalam kondisi miskin; seperti sikap tidak kreatif, malas, boros, dan sebagainya.

Sharp et al. dalam Kuncoro (1997) melihat penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Dalam konteks wilayah perdesaan, sumberdaya yang berlimpah tidak diiringi dengan akses memadai. Sumberdaya di wilayah perdesaan rata-rata telah menjadi hak milik penduduk perkotaan yang memiliki modal besar. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia penduduk perdesaan seringkali berada pada titik yang rendah. Penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka akibat jarak menuju sekolah yang jauh dan akses transportasi yang sulit. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Rendahnya tingkat pendidikan di perdesaan berakibat pada ketidaktahuan penduduk desa terhadap akses modal. Mereka sering terjatuh pada

sistem permodalan rentenir yang mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan.

Para petani di perdesaan seringkali berada pada kondisi miskin, setidaknya dianalisis oleh Geertz (1976) dan Boeke dalam Nasikun (1975) secara relatif serupa. Geertz, melihat bahwa kemiskinan para petani diakibatkan adanya involusi pertanian, yakni kondisi di mana industri pertanian tidak berjalan ke mana-mana. Adapun Boeke melihat kondisi petani yang miskin terjadi karena metode pertanian tradisional mereka, luas lahan yang sempit, harus berhadapan dengan ekonomi modern, metode yang melibatkan teknologi tinggi, serta manajemen yang efektif. Boeke menamakan fenomena ini sebagai kondisi dualisme ekonomi.

Desa memiliki karakter sebagaimana yang dikatakan Kuncoro (1997) menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, serta sikap yang apatis terhadap lingkungan. Hal-hal inilah yang menjadikan desa seringkali berada pada tingkat kemiskinan yang parah.

Kearifan Lokal

Isu kearifan lokal di Indonesia mulai mengemuka dan hangat diperbincangkan ketika begitu banyak persoalan lokal yang tidak dapat diselesaikan karena ketidakmampuan piranti solusi global. Hal ini terjadi karena persoalan kehidupan dan tantangan masyarakat lokal sangat khas dengan nilai-nilai pendekatan budaya lokal yang biasanya sudah menjadi tradisi turun menurun yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yakni dari pendahulu atau nenek moyangnya. Karena berangkat dari isu yang bersifat lokal, maka pendekatan dan nilai lokal masyarakat akan berbeda-beda. Kekhasan ini pula yang sejatinya menjadi pijakan dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat dan landasan membuat berbagai kebijakan di tataran lokal/daerah.

Secara umum kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh

masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, sesungguhnya tidak sulit menemukan berbagai kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dijumpai dalam pepatah, nyanyian, ataupun petuah yang melekat pada kehidupan keseharian. Kearifan lokal biasanya tercermin pula dalam kebiasaan hidup atau pun nilai yang berlaku pada masyarakat bersangkutan (Ridwan, 2007). Kearifan lokal juga didefinisikan sebagai semua bentuk keyakinan, pengetahuan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, dalam Suhartini, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kebumen dan Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada observasi sementara terhadap data statistik Provinsi Jawa Tengah, pada dua kabupaten tersebut berpotensi terjadi kerawanan pangan serta adanya krisis yang besar. Hal ini karena kedua kabupaten tersebut memiliki rata-rata penduduk miskin yang tinggi, serta tingkat rawan pangan yang tinggi juga.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (Sutopo, 2002). Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Kemudian, karena sasaran studi kasus adalah masyarakat miskin di perdesaan, maka studi kasus ini termasuk penelitian dengan studi kasus tunggal (Yin, 2003). Selain itu, karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam usul, maka bisa disebut sebagai studi kasus terpancang (*embedded case study research*).

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat miskin perdesaan yang tinggal di dua kabupaten yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, penelitian ini juga melibatkan aparat pemerintahan yang

bersinggungan langsung, serta lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak dan terkait dengan penanggulangan dan pencegahan krisis.

Penelitian ini lebih mengutamakan informasi kualitatif. Sampling yang digunakan lebih bersifat *snowball* dan *purposive*. Peneliti pertama kali akan menemui calon informan yang dianggap mengetahui tentang permasalahan pokok penelitian ini, yakni tentang krisis. Selanjutnya, peneliti akan menelusuri informan lebih lanjut dengan menggunakan teknik *snowball*, yakni dengan bertanya pada informan awal mengenai informan lain yang dianggap mengerti masalah ini. Selain itu, peneliti menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep teoretis yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik pribadi, dan sebagainya, sehingga bentuk ini akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*), wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi dan dokumentasi

Proses analisis dalam penelitian kualitatif pada dasarnya bersifat induktif. Analisis dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Ada tiga komponen analisis yang saling berkaitan dan berinteraksi, tak bisa dipisahkan dengan kegiatan pengumpulan data yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (Miles dan Huberman dalam Sutopo, 2002). Dalam model analisis ini, tiga komponen aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam melaksanakan proses ini, peneliti aktivitasnya tetap bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan datanya selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Kemudian selanjutnya, peneliti hanya bergerak di antara ketiga komponen analisis tersebut sesudah pengumpulan selesai pada

setiap unitnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Mengenai Krisis

Krisis adalah kejadian yang menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai keadaan krisis, meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat, utamanya masyarakat miskin di perdesaan yang sangat rentan krisis.

Masyarakat miskin desa sebenarnya memiliki pemahaman tersendiri mengenai konsep krisis yang mereka hadapi. Pada masyarakat Desa Serang, krisis dipahami sebagai situasi di mana mereka tidak dapat mencari uang atau keadaan yang memaksa mereka harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Salah satunya adalah bencana periodik yang dinamakan dengan istilah lokal *grubugan*. Sebagaimana dikatakan oleh W, salah satu perangkat Desa Serang, Purbalingga. “(Di sini) Ada siklus (angin kencang) lima tahunan, istilahnya *grubugan*. Bisa seminggu hingga sepuluh hari (angin kencangnya) nonstop”. “Waktu *Grubugan* itu ya warga nggak ke mana-mana, di rumah saja”, tambah W.

Grubugan akhirnya dianggap masyarakat Desa Serang sebagai salah satu puncak krisis, peristiwa yang sebenarnya sangat mereka khawatirkan namun tidak dapat dihindari. Belajar dari *grubugan* dan dampak yang dirasakan, masyarakat Desa Serang akhirnya mampu memrediksikan kejadian *grubugan* tersebut dan memperkirakan cara meminimalisir dampak yang ditimbulkannya. *Grubugan* kemudian mengubah pola hidup warga Desa Serang.

Pola hidup yang berubah salah satunya adalah mengenai konsep pembangunan rumah. Sebelumnya, warga memaknai rumah hanya sekedar tempat tinggal sehari-hari saja. Setelah sering terjadi *grubugan*, warga menjadikan tempat tinggal mereka sekaligus

tempat berlindung dari *grubugan*. Membangun rumah permanen menjadi prioritas utama mereka, dibandingkan kebutuhan primer lainnya seperti pangan dan sandang. Menurut warga, mereka seringkali hanya memegang uang seribu rupiah sehari, walaupun rumah yang mereka diami telah ber dinding dan berlantai keramik serta berstruktur permanen. “Mereka sebenarnya masuk dalam kategori miskin namun lebih memilih memperbaiki rumahnya”, demikian kata lurah dalam sebuah sesi wawancara.

Warga terpaksa membangun rumah secara “mewah” dalam rangka menghadapi *grubugan*, bukan untuk sekedar agar dilihat oleh tetangga atau keluarganya. Mereka melakukannya karena melihat bahwa rumah yang tidak permanen ternyata hancur diterjang *grubugan*, sehingga memerlukan sejumlah uang yang tidak sedikit untuk perbaikannya.

Tidak hanya rumah, *grubugan* juga telah mengubah pola keuangan masyarakat Desa Serang. Warga harus menyiapkan diri ketika *grubugan* terjadi dengan menyimpan sejumlah uang hasil dari pertanian mereka. Penyimpanan uang hasil pertanian tersebut diwujudkan sebagai ternak yang dipelihara oleh komunitas. Ternak dipilih sebagai wujud tabungan karena dianggap lebih sedikit risiko yang ditimbulkannya. Ternak tidak akan terkena dampak *grubugan* apabila kandangnya kuat. Ini berbeda dengan tanaman sayuran yang biasa ditanam warga di lahan mereka. Sayuran sangat mudah terkena dampak *grubugan* sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selain itu, ternak juga relatif stabil harganya, dan mudah pemasarannya. Desa Serang juga dianggap sebagai salah satu desa penghasil ternak di wilayah eks Karesidenan Banyumas. Ternak selain sebagai tabungan warga ketika menghadapi *grubugan*, juga sebagai pekerjaan tambahan saat musim tanam usai dan musim panen belum tiba.

Pengenalan krisis memang tidak selalu berupa pengenalan bersama sebagai sebuah komunitas. Pengenalan krisis seringkali berupa pemahaman personal mengenai krisis itu sendiri. Sehingga, penanganannya bukan

merupakan penanganan yang bersifat bersama namun penanganan pribadi. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Roberts (2005) mengenai definisi krisis, yang mengatakan bahwa penyebab utama krisis adalah peristiwa yang sangat menegangkan, traumatik, atau kejadian yang berbahaya, namun ada dua hal lain yang tidak kalah berperan: (1) persepsi individu mengenai sebuah kejadian sebagai penyebab emosi yang cukup besar dan/atau sebuah gangguan; dan (2) ketidakmampuan individu untuk menyelesaikan menggunakan mekanisme pertahanan (*coping mechanism*) sebelumnya. Krisis dapat diartikan juga sebagai “sebuah kejutan dalam kemapanan”. Biasanya terdapat lima komponen di dalamnya: peristiwa berbahaya atau traumatik, keadaan rentan atau tidak seimbang, faktor pencetus, keadaan krisis aktif berdasarkan persepsi, dan resolusi krisis.

Pengenalan krisis akan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu individu dengan individu lainnya. Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian sebagai *leading sector* yang menyerap banyak tenaga kerja. Anugerah iklim tropis dengan banyak sinar matahari memungkinkan hampir semua tanaman tumbuh. Kondisi geografis yang kemudian menjadi pembeda budaya pertanian antara satu tempat dengan tempat lainnya. Desa Serang, misalnya lebih mengandalkan pertanian sayur, sementara Desa Tambakmulyo lebih mengandalkan pertanian pangan seperti padi dan jagung. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis kedua desa yang berbeda; Desa Serang berada di pegunungan dengan suhu sejuk, dan Desa Tambakmulyo berada di pesisir pantai.

Meskipun keadaan geografis berbeda, namun petani yang merupakan profesi mayoritas penduduk kedua desa lokasi penelitian memiliki persepsi yang hampir sama mengenai keadaan krisis. Kepala Desa Tambakmulyo, A, dalam sesi wawancara mendalam mengatakan, “Warga di (Desa Tambakmulyo) sini umumnya merasakan krisis ketika sedang menunggu masa panen...jadi dari musim tanam nunggu musim panen biasanya pada nggak punya uang”. Hal serupa diutarakan oleh S, salah satu warga

Tambakmulyo peserta FGD. “*Nek mangsan nunggu panen ya langka duit, angger ana perlu apa-apa ya nyilih maring sedulur utawane tangga*” (Ketika sedang menunggu musim panen ya tidak ada uang, kalau ada perlu biasanya meminjam kepada saudara atau tetangga).

Keadaan krisis ini kemudian menjadikan warga harus berusaha mengatasi dengan berbagai cara (*coping mechanism*). Berbeda dengan di Desa Serang yang memiliki inisiatif untuk memelihara ternak, warga petani Desa Tambakmulyo lebih memilih melakukan pekerjaan lain ketika menunggu panen. Ada yang menjadi kuli bangunan, berjualan di Pantai Wisata Suwuk, atau ikut melaut. Apabila mereka tidak mendapatkan penghasilan tambahan, atau ada kebutuhan mendesak mereka meminjam dari beberapa sumber. Salah satu sumber yang banyak disebut dalam sesi FGD adalah pengepul atau yang biasa mereka sebut “Juragan”. Sistemnya mereka pinjam uang dahulu, kemudian dibayar ketika panen dengan cara menjual hasil panen kepada juragan tersebut. Hanya saja, pinjaman dari juragan ini sifatnya produktif: pinjaman yang diberikan untuk melakukan proses tanam. Adapun pinjaman konsumtif, seperti untuk beli televisi, atau menyumbang dalam acara hajatan mereka mengandalkan sumber lain. Ada lagi sumber pinjaman yang kadang-kadang diakses oleh warga desa Tambakmulyo ini, yakni “Bank Harian”. Sebenarnya yang disebut sebagai bank harian ini adalah orang yang menawarkan jasa peminjaman uang dengan cara mencicil harian. Warga akan meminjam pada jasa ini apabila dirasa sumber lain susah diakses.

Permasalahan Komunikasi

Koentjaraningrat (1977) mengatakan bahwa masyarakat desa merupakan komunitas kecil yang menetap di suatu tempat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat desa hanya berpokok pada sebuah komunitas saja. Sebagai sebuah komunitas, masyarakat desa cenderung homogen dan menyatu. Desa merupakan kelompok sosial yang terikat dalam sebuah ikatan yang disebut sebagai

paguyuban (*gemeinschaft*). Tonnies dan Loomis dalam Soekanto (2007) menjelaskan bahwa ciri pokok kelompok paguyuban ini antara lain bersifat *intimate*, hubungan bersifat menyeluruh dan mesra. Selain itu, hubungan dalam kelompok sosial paguyuban ini juga bersifat *private* atau pribadi dan *exclusive* atau khusus (ikatan paguyuban itu hanya untuk orang dalam komunitas saja). Dengan demikian, komunikasi yang terjadi antar anggota paguyuban bersifat intens, dan lekat.

Kondisi krisis ternyata dapat mengubah kondisi ikatan sosial masyarakat pedesaan tersebut. Komunikasi yang awalnya intens dan lekat berubah menjadi intens namun penuh dengan muatan konflik. Setelah jangka waktu tertentu, komunikasi yang intens mulai menurun. Akibatnya ikatan sosial mereka merenggang. Dalam sesi wawancara mendalam dengan dua kepala desa ditemukan bahwa penyebab merenggangnya ikatan sosial warga petani desa adalah akibat kecemburuan sosial. Ketika terjadi krisis, pemerintah pernah memberikan kebijakan *cash transfer* yang dikenal dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi penderitaan kaum miskin akibat kenaikan harga BBM. Ternyata kebijakan BLT memiliki dampak sosial dan komunikasi di dua desa yang diteliti. “Kemarin waktu ada pembagian BLT yang tidak merata, membuat warga yang tidak *kebagian* jadi asosial...jadi nggak mau *kerigan* (kerja bakti)”, kata A, Kepala Desa Tambakmulyo. Permasalahan komunikasi juga terjadi pada warga Desa Serang. Banyak warga tidak puas dengan ketua RT yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan penyaluran dana BLT. Tekanan yang kuat dari warga membuat seluruh ketua RT di Desa Serang akhirnya sepakat untuk mengundurkan diri. “Iya (mengundurkan diri), waktu itu saya pusing sekali bagaimana menyelesaikan masalah (pengunduran diri ketua RT) itu. Padahal sebenarnya mereka tidak salah, kami tidak tahu menahu kategori warga miskin yang berhak mendapatkan BLT”, kata S, Kepala Desa Serang. Alhasil

modal sosial dalam masyarakat menjadi berkurang.

Secara teoretis, pada saat krisis terjadi terdapat beberapa hal yang mencolok. Pertama; arus informasi mengalami peningkatan luar biasa, meliputi arus informasi “dari” maupun “ke” titik krisis tersebut. Kedua; sistem komunikasi terganggu (kehilangan keseimbangan), diikuti oleh munculnya langkah-langkah pemulihan keseimbangan, dan akhirnya pemulihan keseimbangan fungsi sistem pada tingkat keseimbangan baru. Ketiga; kandungan emosi dalam komunikasi krisis sangat mencolok. Keempat; terjadi “jalinan” antara jaringan komunikasi antarpribadi dan komunikasi media. Dan kelima; keterikatan manusia pada media komunikasi massa mengalami lonjakan besar (Schramm dan Robert, dalam Hardjana, 1998).

Teori yang dikatakan Schramm dan Robert mengenai guncangan sistem komunikasi terjadi di kedua lokasi penelitian. Masyarakat perdesaan yang seharusnya memiliki ikatan sosial kuat, ternyata justru merenggang ketika krisis datang. Ironisnya guncangan komunikasi ini terjadi justru ketika bantuan pemerintah datang.

Persepsi terhadap Penanganan Krisis

Penanganan krisis yang dimaksud dalam penelitian ini tidak semata-mata hanya melalui perantara pemerintah, namun juga upaya mandiri warga dalam menangani krisis. Warga kedua desa dalam sesi *focus group discussion* bersepakat bahwa penanganan krisis dari pemerintah akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, warga menganggap model penanganan yang diberikan pemerintah kadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan tidak menyentuh akar masalah. Akhirnya, warga desa cenderung lebih suka melakukan inisiatif agar mereka dapat segera terlepas dari krisis yang dihadapi.

Menurut warga, mereka merasakan upaya penanganan krisis dari pemerintah melalui beberapa kebijakan. Pertama, kebijakan BLT yang digulirkan pada tahun 2005 dan 2009. Kebijakan BLT ini berkaitan

dengan kenaikan harga BBM sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2004. Menurut program *Bolsa Familia* di Brasil, pemerintah berharap BLT dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Hanya saja BLT di Indonesia tanpa syarat. Kedua, kebijakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), yang secara mekanisme sama dengan BLT. Kemudian PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) yang merupakan program peningkatan sarana dan prasarana masyarakat.

Warga melihat program-program penanganan krisis yang telah diluncurkan merupakan sebuah niat baik pemerintah dalam mengurangi dampak krisis bagi masyarakat. Hanya saja, sebagian program tersebut terkesan terburu-buru dilaksanakan tanpa melihat realitas di lapangan. “Misalnya saja penentuan warga yang berhak menerima bantuan, kalau di desa nggak bisa didasarkan pada bentuk rumah. Itu banyak yang rumahnya bagus justru jadi petani penggarap pada yang rumahnya jelek, tapi punya tanah luas”, kata Suryono, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Serang. Tampak dari ucapan Sy ini, masyarakat desa tidak dilibatkan dalam beberapa program penanggulangan krisis dari pemerintah.

“Seharusnya program yang diberikan itu berbasis komunitas, tidak individu. Jadi dana yang hendak digulirkan diserahkan kepada komunitas, mereka bertanggung jawab, serta harus diawasi”, kata S, Kepala Desa Serang. Artinya, masyarakat tetap menerima bantuan dari pemerintah untuk penanggulangan dampak krisis, namun hendaknya melibatkan mereka secara aktif.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin di daerah perdesaan rentan terkena dampak krisis. Dampak krisis yang dirasakan oleh masyarakat miskin tersebut dapat menimbulkan dampak ikutan, seperti beban

sosial, psikis, kesehatan, dan komunikasi. Dampak ikutan yang perlu diperhatikan pada kasus kehidupan masyarakat perdesaan (paguyuban) adalah masalah komunikasi yang merupakan penciri kelompok masyarakat ini.

Rangkaian wawancara dan diskusi kelompok menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di Desa Serang maupun Desa Tambakmulyo telah dapat memahami dan memetakan krisis yang hendak maupun telah dihadapi. Pemahaman dan pemetaan krisis ini umumnya dapat dilakukan pada krisis yang terjadi secara periodik serta dalam kurun waktu yang cukup lama. Akan halnya krisis yang terjadi secara insidental apalagi dalam skala yang besar, belum mampu ditangani kelompok masyarakat miskin di perdesaan ini karena seringkali tidak terprediksi. Krisis yang termasuk dalam kategori ini antara lain bencana yang besar dan masif, atau krisis moneter nasional seperti yang terjadi beberapa tahun silam.

Lebih lanjut penelitian ini menemukan fakta bahwa masalah komunikasi muncul setelah merenggangnya ikatan sosial paguyuban akibat krisis. Renggangnya ikatan sosial paguyuban ditandai salah satunya dengan perubahan bentuk konflik yang semula laten menjadi manifes. Salah satu contoh bentuk konflik yang manifes adalah keengganan warga untuk mengikuti *kerigan* atau kegiatan gotong royong, dan membebarkannya kepada warga lain.

Para informan dari dua lokasi penelitian bersepakat bahwa terjadinya konflik sosial serta merenggangnya ikatan sosial paguyuban bukan merupakan dampak langsung krisis. Mereka melihat hal tersebut sebagai akibat dari penanganan krisis yang tidak tepat sasaran. Menurut para informan, pemerintah seharusnya lebih melakukan pendekatan serta melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penanganan krisis.

Saran

Perencanaan dan riset mendalam sebelum tindakan penanganan krisis dengan demikian menjadi rekomendasi utama penelitian ini. Secara khusus faktor

komunikasi harus mendapatkan perhatian lebih, karena merupakan salah satu modal sosial pada kelompok masyarakat paguyuban. Perencanaan penanganan krisis komunikasi, dengan demikian, tidak dapat dibuat terpisah melainkan menjadi bagian integral dari perencanaan strategis secara keseluruhan.

Pada tahap berikutnya, diharapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian krisis. Dengan demikian, meskipun terdapat tiga kategori besar manajemen krisis yang meliputi pendekatan pengobatan (*therapeutic*), manajemen isu (*issues management*), dan pendekatan lengkap (*electic*), namun sifat penanganan krisis akan selalu berbeda menyesuaikan karakter tempat terjadinya krisis.

Berkaitan dengan komunikasi dalam situasi krisis, ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapatkan perhatian lebih oleh komunitas masyarakat miskin di perdesaan. Hal yang perlu dilakukan antara lain: (1) perlunya komunikasi yang terpusat atau datang dari satu sumber yang disepakati bersama, untuk menjaga tidak terjadinya bias komunikasi, (2) menyebarkan berita baik maupun berita buruk secara transparan untuk dicermati dan diselesaikan bersama, (3) menyebarkan informasi sedini mungkin sebelum terjadi dampak yang tidak diinginkan, serta (4) tidak membatasi pada satu saluran komunikasi dan justru harus menggunakan aneka saluran yang cocok untuk mencapai kelompok-kelompok khalayak dengan karakter berbeda-beda. Dengan terlaksananya empat hal tersebut, diharapkan terjadi keharmonisan dan merekatnya kembali interaksi komunitas paguyuban di perdesaan.

Peneliti telah berusaha meminimalisir bias dalam pengumpulan maupun analisis data yang dilakukan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bias tersebut terjadi. Sifat deskriptif penelitian ini mungkin belum cukup menggambarkan realitas sosial, terutama yang berkaitan dengan tema kearifan budaya lokal. Pendekatan seperti etnografi komunikasi dapat digunakan untuk melengkapi, atau mungkin membantah

beberapa kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwas, Oos M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Coombs, W. Timothy. (2010). *Parameters for Crisis Communication*. Dalam: *The Handbook of Crisis Communication*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Falkheimer, Jesper dan Heide, Mats. (2010). *Crisis Communicators in Change: From Plants to Improvisations*. Dalam: *The Handbook of Crisis Communications*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Geertz, Clifford. (1976). *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Penerjemah: Supomo. Jakarta : Bhratara K.A.
- Koentjaraningrat (ed). (1977). *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman : Sejarah Diferensiasi di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Grasindo.
- Kriyantono, Rachmad. (2013). *Public Relations dan Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nasikun. (1985). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Putra, I Gusti Ngurah. (1999). *Manajemen Hubungan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Roberts, A. R. (2005). Bridging the past And present to the future of crisis intervention And crisis management. In A. R. Roberts (Ed.), *Crisis intervention handbook: Assessment, treatment and research* (3rd ed., pp. 3–34). New York: Oxford University Press.

- Sen, A.K. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred Knof.
- Shockley-Zalabak, Pamela. (2006). The Communications of Trust. Dalam Tamara L. Gillis. *The IABC Handbook of Organizational Communication*. IABC International Association of Business Communicators.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Supriatna, Tjahya. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora.
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wilmot, W.W. dan Hocker, J.L. (1998). *Interpersonal Conflict* (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Yin, Robert K. (2003). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal/Prosiding:

- Hale, E.J., Dulek, R.E, dan Hale, D.P. (2005). Crisis Response Communication Challenge, Building Theory from Qualitative Data. *Jurnal of Business Communication*, 42 (2) April, pp. 112-114
- Hardjana, Andre A. (1998). Manajemen Komunikasi dalam Krisis. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* (2) Oktober, hal. 12-23.
- Ridwan, Nurma Ali. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Ibdā'*, 5 (1) Juni, hal. 27-38.
- Suhartini. (2009). *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Swadaya Alam dan Lingkungan*. Makalah Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pendidikan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009

Internet:

- Acandra. (2010). *Komunikasi Krisis Tentukan Keberhasilan*. Tersedia dalam:

<<http://regional.kompas.com/read/2010/03/10/07362927/Komunikasi.Krisis.Tentukan.Keberhasilan>>, diakses 3 April 2013.